

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1. Maksud Penelitian	6
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1. Kegunaan Teoretis.....	7
1.4.2. Kegunaan Praktis.....	8
1.5. Kerangka Pemikiran.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Lokasi Penelitian.....	14
1.8. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1.	Tinjauan Umum Desa	17
2.1.1.	Pengertian Desa.....	17
2.1.2.	Pemerintahan Desa.....	19
2.1.1.	Kewenangan Desa	21
2.2.	Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	25
2.2.1.	Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD).....	25
2.2.2.	Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa.....	27
2.2.3.	Hak, Kewajiban dan Kewenangan BPD.....	29
2.3.	Tinjauan Umum Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat	30
2.3.1.	Konsep Penampungan	30
2.3.2.	Konsep Penyaluran.....	31
2.3.3.	Konsep Aspirasi	32
2.3.4.	Konsep Masyarakat	33
2.3.5.	Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat .	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
3.1.	Hasil Penelitian	37
3.1.1.	Gambaran Umum Desa Karyamukti Kecamatan Pataruman.....	37
3.1.1.	Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa oleh BPD Dihubungkan	

	dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016	53
3.1.2.	Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa oleh BPD Dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016	55
3.1.4.	Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa oleh BPD Dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.....	57
3.2.	Pembahasan.....	58
3.2.1.	Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa oleh BPD Dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016	58
3.2.2.	Kendala-Kendala dalam Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa oleh BPD Dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016.....	60

3.2.3. Upaya-Upaya untuk Mengatasi Kendala yang Timbul dalam Implementasi Penampungan dan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Desa Oleh BPD Dihubungkan dengan Pasal 31 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016	64
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	